ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PASIEN DALAM PENANGANAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

Reny Suryanti¹, Ismiati², Ade Sissca Villia³, Rosalia Rina Bathari⁴ Mualim⁵

1,2,3 Promosi Kesehatan, Poltekkes Bengkulu,
4,5 Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Bengkulu.
corresponding author: unireny77@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kesehatan dalam rangka melindungi hak-hak pasien, terkait penyakit tidak menular (PTM). Kebijakan kesehatan yang tepat dalam penanganan PTM sangatlah penting, tidak hanya dalam upaya pencegahan dan pengobatan namun juga dalam melindungi hak-hak dasar pasien. Untuk itu peranan puskesmas menjadi penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasien dalam memperoleh haknya dalam penanganan penyakit tidak menular berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mempunyai kewenangan untuk menangani penyakit tidak menular (PTM), yaitu Puskesmas berperan dalam upaya pencegahan dan pengendalian PTM di Tingkat Masyarakat, pelayanan kesehatan dasar, promosi kesehatan, dan edukasi masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi faktor risiko.

Metode : Penelitian ini bersifat yuridis-empiris, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan peraturan perundang-undangan, artikel, literatur, dan dokumen mengenai kebijakan kesehatan dalam rangka perlindungan hak pasien dalam penanganan PTM di Puskesmas Betungan.

Hasil : hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kesehatan terhadap perlindungan hak pasien dalam pengobatan penyakit tidak menular telah mendapat pelayanan yang optimal. Namun masih terdapat kurangnya sarana dan prasarana sumber daya manusia di Puskesmas Betungan.

Kesimpulan: Dari penelitian ini bahwa penanggulangan PTM di puskesmas betungan sudah mendapatkan penanganan yang optimal dalam mendapatkan akses terhadap pengobatan, informasi medis dan perlindungan privasi pasien, namun masih ditemukan kendala-kendala dalam implementasi kebijakan kesehatan terhadap perlindungan hak pasien dalam penanganan PTM ini, seperti keurangan SDM serta sarana dan prasarana.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Hak Pasien, Penyakit Tidak Menular.

ABSTRACT

Background: This research aims to analyze the implementation of health policies in order to protect patient rights regarding non-communicable diseases (NCDs). Appropriate health policies in handling NCDs are very important, not only in prevention and treatment efforts but also in protecting patients' basic rights. For this reason, the role of community health centers is important in providing legal protection for patients in obtaining their rights in treating non-communicable diseases based on Law Number 17 of 2023 concerning Health. at the Community Level, basic health services, health promotion and community education, as well as monitoring and evaluating risk factors.

Method: This research is juridical-empirical in nature, using qualitative research methods. The data analysis used is descriptive analysis collected through in-depth interviews and statutory regulations, articles, literature and documents regarding health policy in the context of protecting patient rights in the treatment of NCDs at the Betungan Health Center.

Results: The results of this research indicate that the implementation of Health policy towards protecting patient rights in the treatment of non-communicable diseases has received optimal service. However, there is still a lack of human resource facilities and infrastructure at the Betungan Community Health Center.

Conclusion: From this research, it is clear that the handling of NCDs at the Betungan Community Health Center has received optimal treatment in gaining access to treatment, medical information and protection of patient privacy, but there are still obstacles found in the implementation of health policies regarding the protection of patient rights in handling NCDs, such as a shortage of human resources and facilities and infrastructure.

Keywords: Policy Implementation, Protection of Patient Rights, Non-Communicable Diseases.

PENDAHULUAN

Penyakit tidak menular (PTM) telah menjadi beban kesehatan global yang signifikan, dengan dampak yang luas pada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kesehatan yang tepat dalam penanganan PTM menjadi krusial, tidak hanya dalam upaya pencegahan dan pengobatan, tetapi juga dalam melindungi hak-hak fundamental pasien. Meskipun telah ada serangkaian kebijakan yang diimplementasikan untuk menangani PTM, analisis mendalam terhadap implementasi kebijakan tersebut dalam konteks perlindungan hak pasien perlu dilakukan.

Penyakit tidak menular (PTM) adalah terkait dengan perubahan gaya hidup dan kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang penyakit tidak menular (PTM) ini. Perubahan beban penyakit telah terjadi dalam periode tiga dekade terakhir, dari penyakit menular ke Penyakit Tidak Menular (PTM). Setiap tahunnya PTM menyebabkan kematian pada sekitar 41 juta orang, setara dengan 74% dari seluruh penyebab kematian di dunia. Kematian dini akibat PTM yang terjadi di negara dengan pendapatan rendah dan menengah (*low-and middle-income countries*) adalah 86% kematian, dan sekitar 17 juta orang meninggal sebelum usia 70 tahun. Penyakit kardiovaskular merupakan penyakit tidak menular yang menyebabkan angka kematian tertinggi yakni sekitar 17,9 juta kematian setiap tahunnya, diikuti dengan kanker (9,3 juta kematian), penyakit pernapasan kronik (4,1 juta kematian) dan diabetes (2 juta kematian termasuk

penyakit ginjal kronik akibat diabetes). Keempat penyakit tersebut menyebabkan sekitar 80% kematian dini akibat PTM (Ditjen p2p, 2023)

Kebijakan Kesehatan yang ada seharusnya sudah memberikan perlindungan terhadap hak pasien. Pentingnya peranan puskesmas ataupun rumah sakit dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasien dalam mendapatkan haknya dalam penanganan penyakit tidak menular. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain dkk, bahwa dalam melaksanakan kebijakan tentunya diperlukan sumber daya yang mendukung Upaya implementasi tersebut (Zulkarnain et al., 2022).

Puskesmas berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mempunyai kewenangan dalam penanganan penyakit tidak menular (PTM), yaitu puskesmas berperan dalam Upaya pencegahan dan pengendalian PTM di Tingkat Masyarakat, pelayanan kesehatan primer, promosi kesehatan dan edukasi masyarakat, serta monitoring dan evaluasi faktor risiko. Ini termasuk program skrining, edukasi dan penurunan faktor risiko PTM seperti diabetes, hipertensi dan penyakit kardiovaskuler. Disini peran puskesmas sebagai unit kesehatan dasar dalam mengatasi penyakit tidak menular yang semakin meningkat di Indonesia, dengan mengutamakan pendekatan promotive dan preventif. Juga diharapkan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan nasional dalam penanganan dan

pengecahan PTM yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. Dalam kerangka ini, untuk memahami sejauh mana kebijakan kesehatan yang ada telah mengakomodasi dan melindungi hak-hak pasien dapat memberikan wawasan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan yang ada, mengisi kesenjangan, dan merumuskan arah kebijakan yang lebih. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*. Dengan pendekatan *kualitatif* Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Populasi dan sample dalam penelitian ini adalah tenaga kesehatan yang terkait dalam penanganan PTM di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu. Pengambilan dan penentuan sampel dalam penelitian ini disesuaikan dengan jumlah tenaga kesehatan yang terkait dalam pelayanan. Hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan. Analisis implementasi kebijakan kesehatan terhadap perlindungan hak pasien dalam penanganan penyakit tidak menular (PTM) di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu sudah mendapatkan penanganan yang optimal dalam mendapatkan akses terhadap Kebijakan kesehatan dalam perlindungan hak pasien sangatlah penting dalam hal penerapannya, terutama dalam penanganan penyakit tidak menular (PTM) yang semakin meningkat. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pasien memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang adil, dan berkualitas serta sesuai dengan hak-hak yang diakui secara hukum. Melalui penerapan kebijakan yang efektif, diharapkan pasien yang menderita penyakit tidak menular dapat menerima penanganan yang optimal, termasuk dalam hal akses terhadap pengobatan, informasi medis, dan perlindungan privasi. Penanggulangan PTM dilaksanakan melalui Upaya kesehatan Masyarakat dan Upaya kesehatan perseorangan (Undang-Undang RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023).

holistik dan inklusif untuk penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM) di masa depan. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlunya membahas mengenai “Analisis Implementasi Kebijakan Kesehatan Terhadap Perlindungan Hak Pasien Dalam Penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM)“.

METODE PENELITIAN

kebijakan terhadap perlindungan hak pasien dalam penanganan penyakit tidak menular. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Betungan di kota Bengkulu. dalam penanganan PTM. Dan pasien PTM (*Purposive Sampling*). Berdasarkan penentuan sampel tersebut didapatkan adalah 6 orang informan di Puskesmas Betungan kota Bengkulu.

HASIL

pengobatan, informasi medis dan perlindungan privasi pasien, namun masih ditemukan kendala-kendala dalam implementasi kebijakan kesehatan terhadap perlindungan hak pasien dalam penanganan PTM ini, seperti kekurangan SDM serta sarana dan prasarana.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu dapat diketahui bahwa dalam penanggulang penyakit tidak menular di Puskesmas Betungan sudah mempunyai program PTM dan sudah ada penanggung jawabnya. Program tersebut rutin dilaksanakan dan digabungkan kegiatannya dengan Pos Binaan Terpadu (posbindu). Seperti kita ketahui bahwa Posbindu adalah kegiatan untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM), yaitu antara lain pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kolesterol dan asam urat, pengukuran berat badan, dan tinggi badan, yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam mencegah dan menemukan dini faktor risiko PTM yang dilaksanakan secara terpadu, rutin dan periodik

(Puskesmas Muara Belida, 2023). Serta ketersediaan anggaran untuk penanggulangan PTM juga sudah disiapkan sebagai langkah yang diambil dalam implementasi kebijakan mengenai penanganan PTM. Anggaran dalam penanggulangan PTM merupakan alokasi dana yang disiapkan oleh Pemerintah untuk mendukung program dan kebijakan dalam mencegah, mengendalikan dan merawat PTM.

Kebijakan kesehatan dalam penanggulangan penyakit tidak menular di Puskesmas Bentungan sudah mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI No 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, walaupun dalam pelaksanaan kebijakan ini adanya kendala yang dihadapi di Puskesmas Betungan yakni terkait dengan kurangnya sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana yang kurang pada saat pemeriksaan pasien.

Seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2016), bahwa manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Implementasi kebijakan menuntut kesiapan sumber daya, jika sumber daya tidak memadai maka kinerja kebijakan akan rendah (Sopiana & Arifianti, 2021). Kurangnya sarana dan prasarana dapat menyulitkan pasien PTM untuk mendapatkan layanan kesehatan. Hak pasien untuk akses layanan kesehatan yang setara menjadi terabaikan. Kekurangan alat untuk penanganan PTM ini dapat memperlambat proses penegakan diagnosis dan perawatan. Begitu juga dengan ketersediaan obat-obatan dan stok yang

Peran edukasi dan kesadaran publik, dalam melindungi hak pasien dengan penyakit tidak menular sangat penting, untuk itu Puskesmas Betungan sudah membuat poster atau leaflet tentang hak dan kewajiban pasien dalam layanan kesehatan. Pasien juga berhak menuntut jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan haknya. Sehubungan dengan itu ada

tidak cukup untuk pasien PTM, hal ini dapat menghambat hak pasien untuk mendapatkan perawatan yang berkelanjutan.

Perlindungan hak pasien berdasarkan Undang-undang Kesehatan merupakan Upaya hukum yang bertujuan untuk memastikan setiap pasien mendapatkan hak-haknya saat menerima layanan kesehatan. Berpedomana pada Pasal 276 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa pasien mempunyai hak: Mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya; Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya; Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu; Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KL atau wabah; Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis; Meminta pendapat tenaga medis dan tenaga kesehatan lain, dan; Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pasien sudah memperoleh haknya dalam menerima layanan kesehatan. Tenaga medis dan tenaga kesehatan di puskesmas betungan sudah memberikan layanan kesehatan dalam penanganan PTM tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi. Pasien juga sudah mendapatkan informasi yang baik dan obat-obatan tentang kesehatan mereka

langkah-langkah yang diambil puskesmas untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai hak-hak pasien yaitu kegiatan promosi kesehatan berupa sosialisasi, penyuluhan dan melakukan konseling, serta menyebarkan informasi melalui media sosial.

Implementasi kebijakan kesehatan dalam penanganan PTM memiliki dampak

signifikan terhadap perlindungan hak pasien. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pasien dengan PTM sudah memiliki akses yang adil dan setara dalam layanan kesehatan, termasuk dengan diagnosa dini, pengobatan dan tidak lanjut. Pasien juga sudah mendapatkan informasi yang jelas mengenai penyakit dan pengobatannya.

Kebijakan kesehatan yang efektif dalam penanganan penyakit tidak menular (PTM) dapat meningkatkan perlindungan hak pasien, seperti akses terhadap pelayanan yang adil, bebas dari stigma dan diskriminasi, hak dalam pengambilan keputusan medis, serta perlindungan dari beban finansial.

Dalam era perkembangan teknologi saat ini, inovasi – inovasi terbaru dapat berperan penting dalam memperkuat perlindungan hak pasien dengan penyakit tidak menular (PTM), seperti penggunaan rekam medis, telemedicine, dan aplikasi kesehatan lainnya yang berbasis AI. Sehingga dapat mendukung implementasi kebijakan kesehatan yang efektif dan berkeadilan bagi pasien PTM. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa di Puskesmas Betungan dalam penanganan PTM ini inovasi dan teknologi yang digunakan adalah aplikasi sehat Indonesiaku (ASIK), adalah aplikasi untuk mendeteksi dini penyakit menular dan tidak menular.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya mengenai analisis implementasi kebijakan kesehatan terhadap perlindungan hak pasien dalam penanganan penyakit tidak menular (PTM) di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu sudah mendapatkan penanganan yang optimal dalam mendapatkan akses terhadap pengobatan, informasi medis dan perlindungan privasi pasien, namun masih ditemukan kendala-kendala dalam implementasi kebijakan kesehatan terhadap perlindungan hak pasien dalam penanganan

PTM ini, seperti kekurangan SDM serta sarana dan prasarana.

Kekurangan SDM dan sarana-prasarana secara langsung dapat menghambat implementasi kebijakan kesehatan yang efektif dalam melindungi hak pasien, terutama dalam konteks penanggulangan PTM. Jika dilihat dari teori perlindungan HAM terlihat bahwa adanya ketidakseimbangan antara hak dan kemampuan negara dalam memenuhi hak atas kesehatan.

Untuk itu perlu adanya upaya perbaikan dalam pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kapasitas, serta penambahan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan dengan menyediakan alat-alat medis yang memadai dalam penanganan PTM, untuk memastikan bahwa hak setiap pasien terlindungi dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit. (2023). *ditjen p2plaporan kinerja semester I tahun 2023 direktorat. jakarta. Ditjen p2p.* (2023). *Laporan Kinerja SMT 1 Tahun 2023 Ditjen p2p.*
- Puskesmas Muara Belida. (2023). *Pelaksanaan Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Penyakit Tidak Menular di Wilayah Kerja Puskesmas.* <https://sippn.menpan.go.id/berita/45223/puskesmas-muara-belida/pelaksanaan-kegiatan-pos-pembinaan-terpadu-posbindu-penyakit-tidak-menular-di-wilayah-kerja-puskesmas>
- Undang-undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pub. L. No. Undang-undang RI No 17 (2023).
- Sopiana, C., & Arifianti, R. (2021). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Bandung (Studi Kasus Penanggulangan Covid19 di Puskesmas Majalaya) Tahun 2021.* 4(3), 173–188.
- Zulkarnain, Yunus, & Lukman. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 19 Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Sosio Sains*, 8, 129–148.

- Tim kebijakan jaminan sosial kesehatan kebijakan perlindungan sosial sekretariat tnp2k. (2021). Kajian kebijakan implementasi layanan penyakit tidak menular (ptm) katastrofik pada era jaminan kesehatan nasional tahun 2015-2018. Jakarta: tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan.
- Alcala, M., Gutierrez-Vega, S., Castro, E., Guzman-Gutiérrez, E., Ramos-Álvarez, M. P., & Viana, M. (2018a). Antioxidants and oxidative stress: Focus in obese Candra Sopiana¹, R. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Bandung. *Responsive*, Volume 4 No. 3.
- Duha Zaffar, M. A. (2024). Diabetic Ketoacidosis Without Diabetes Mellitus in Acute Pancreatitis. *Clinical Case*.
- Euri'dice Martí'nez Steele¹,R. (2013). Behavioural patterns of protective and risk factors for. *Public Health Nutrition*, 17(2), 369–375.
- Fauzia Fahmi, M. Z. (2023). Kebijakan hukum pemerintah indonesia dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 ditinjau dari hak asasi manusia atas kesehatan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 355-372.
- Hannah Marcus a. L. (2023). Climate change and the public health imperative for supporting migration. *Journal of Migration and Health*.
- Jawahitha Sarabdeen a. E. (2022). Creating standards for Canadian health data protection during health. *Heliyon*.
- Karly I. Cini, N. R. (2023). Towards responsive policy and actions to address noncommunicable. *The Lancet Regional*.
- Muh. Zulkarnain¹, R. Y. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan. *Jurnal Sosio Sains*.
- Nurhidayati, T. N. (2019). Evaluasi Implementasi Program Penyakit Tidak Menular di Puskesmas. *Jurnal Kesehatan Ceadum*.
- Nurul Evi Yanti, ., N. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Puskesmas Dalam Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 174.
- Oluwabunmi L. Niyi-Gafar, O. S. (2022). The impact of viral diseases on the rights of vulnerable population. *Social Sciences & Humanities Open*, 6.
- Khoirul Anisak⁽¹⁾, D. S. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponogoro Dalam Penetapan Status Kejadian Luar Biasa (Klb) Wabah Demam Berdarah Dengue (Dbd) Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Wedana*, Volume V No 2.
- Lia Priscilla, C. Y. (2024). Immunotherapy targeting the obese white adipose tissue. *Bioactive Materials*, 35.
- Lutfy Laksita Pranandari, S. P. (2017). Analisis implementasi program pos pembinaan terpadu. *Jurnal kesehatan masyarakat*, Volume 5, Nomor 4, *America* (Vol. 100, Issue 6, pp. 1199–1215). W.B. Saunders.
- Korespondensi, A., & Mulianto, N. (n.d.). *Malondialdehid sebagai Penanda Stres Oksidatif pada Berbagai Penyakit Kulit*.
- Langley-Evans, S. C., Pearce, J., & Ellis, S. (2022). Overweight, obesity and excessive One Health High-Level Expert Panel (OHHLEP), David T.S. Hayman a, Wiku B. Adisasmito b., (2023). Developing One Health surveillance systems. *One Health*.
- Prasetiani, A. G. (2020). Literasi kesehatan penyakit tidak menular: literature review. *Ners LENTERA*.
- Prianto, A. (2020). Implementasi kebijakan penanggulangan penyakit menular oleh dinas kesehatan. *Jak publik (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)*, Vol. 1, No. 3.
- Pricilia mawuntu, j. R. (2022). Efektivitas kebijakan pemberlakuan pembatasan

- kegiatan masyarakat (ppkm) skala mikro dalam penyebaran covid-19 di JAP
- Puji Krisdiyantoro, S. R. (2024). Aspek Hukum Penanganan Pasien Tuberkulosis. Syntax Admiration.
- Rustandi. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Kesehatan Terhadap Efektivitas Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Pasien Rawat Jalan Dan Inap (Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah). Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 12, Nomor 1, Januari 2021.
- Seenivasan Boopathi, P. S. (2023). Expanding germ-organ theory: Understanding non-communicable diseases. Pharmacological Research, 194.
- Shimaa Elkomy, T. J. (2024). WHO non-communicable diseases Global Monitoring Framework: Socio-Economic Planning Sciences, 95.
- Siti Aisyah, D. L. (2022). Fauzia Fahmi, M. Zamroni, Budi Pramono. Journal of Public Policy and Management Review